

BAB IV

Analisis Data dan Pembahasan

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Objek yang dipilih pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Yogyakarta yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling untuk pengambilan sampel yaitu teknik sampel yang sesuai dengan persyaratan yang mudah dijangkau oleh peneliti yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Yogyakarta. Berdasarkan rumus *slovin* yang digunakan, jumlah sampel yang harus diambil dalam penelitian ini minimal 100 responden. Pada penelitian ini dengan resiko tidak terpenuhinya sampel, maka disebarakan kuisisioner sebanyak 145 angket kuisisioner kepada responden. Kuisisioner yang layak untuk diteliti dan memenuhi persyaratan yaitu sebanyak 102 kuisisioner sehingga sampel yang terpilih pada penelitian ini sebanyak 102 wajib pajak yang selanjutnya digunakan untuk analisis dan pengujian hipotesis. Berikut data rincian hasil penyebaran kuisisioner:

Tabel 4.1

Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuisisioner yang disebar	145	100%
Kuisisioner yang kembali	132	91%
Kuisisioner yang tidak kembali	13	9%
Kuisisioner yang tidak layak	30	23%
Kuisisioner yang layak	102	77%

Sumber: Data primer, diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 145 kuisisioner yang disebar secara langsung kepada responden, yang kembali dan layak untuk dianalisis adalah 102 kuisisioner. Kuisisioner yang tidak memenuhi syarat dikarenakan terdapat bagian identitas responden yang belum diisi secara lengkap.

4.2 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta dengan jumlah responden sebanyak 102 wajib pajak.

Karakteristik responden dikelompokkan menurut:

- a. Usia
- b. Jenis Kelamin,
- c. Lama Memiliki NPWP
- d. Pendidikan Terakhir

e. Jenis Pekerjaan

Karakteristik responden dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Karakteristik Responden berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Presentase
25-35 Tahun	20	19,6%
36-45 Tahun	34	33,3%
46-55 Tahun	36	35,3%
>55 Tahun	12	11,8%
Total	102	100%

Sumber: Data primer, diolah 2019

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa jumlah responden terbesar adalah responden yang berusia 46-55 tahun yaitu sebanyak 36 atau 35,3% sedangkan jumlah terendah adalah responden yang berusia >55 tahun yaitu sebanyak 12 responden atau 11,8%.

Tabel 4.3

Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	24	23,5%
Perempuan	78	76,5%
Total	102	100%

Sumber: Data primer, diolah 2019

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa jumlah responden terbesar adalah responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 78 atau 76,5% sedangkan jumlah terendah adalah laki-laki yaitu sebanyak

24 atau 23,5%. Maka dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin perempuan lebih dominan dibandingkan dengan laki-laki.

Tabel 4.4

Karakteristik Responden berdasarkan Lama Memiliki NPWP

Lama Memiliki NPWP	Jumlah	Presentase
1-5 Tahun	47	46,1%
6-10 Tahun	36	35,3%
>10 Tahun	19	18,6%
Total	102	100%

Sumber: Data primer, diolah 2019

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa jumlah responden terbesar adalah responden yang memiliki NPWP dalam kurun waktu 1-5 tahun yaitu sebanyak 47 atau 46,1%, sedangkan jumlah responden terendah memiliki NPWP selama lebih dari 10 tahun yaitu sebanyak 19 atau 18,6%. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian sudah memiliki NPWP selama 1-5 tahun.

Tabel 4.5

Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase
S3	1	1%
S2	14	13,7%
S1	33	32,3%
Diploma	23	22,5%
SMA/Sederajat	28	27,5%
Lainnya	3	3%
Total	102	100%

Sumber: Data primer, diolah 2019

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa jumlah responden terbesar pada tingkat pendidikan terakhir S1 yaitu sebanyak 33 atau 32,3%, sedangkan jumlah responden terendah pada tingkat pendidikan terakhir S3 yaitu sebanyak 1 responden atau 1%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini memiliki tingkat pendidikan S1.

Tabel 4.6
Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan

Bidang Usaha atau Profesi	Jumlah	Presentase
Fashion	8	8%
Kerajinan	26	25%
Kuliner	38	37%
Bidang Usaha Lainnya	18	18%
Dokter	3	3%
Notaris	6	6%
Konsultan	3	3%
Total	102	100%

Sumber: Data primer, diolah 2019

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa jumlah responden terbesar adalah responden yang melakukan kegiatan usaha yaitu sebanyak 90 responden yang terdiri dari bidang usaha fashion, kerajinan, kuliner dan lainnya. Kegiatan usaha yang paling banyak dilakukan yaitu pada bidang usaha kuliner sebanyak 38 responden atau 37%, sedangkan kegiatan usaha terendah pada bidang usaha fashion yaitu sebesar 8 atau 8%. Jumlah responden untuk pekerjaan bebas sebesar 12 responden yang terdiri dokter, notaris dan konsultan.

4.3 Uji Kualitas Data

Pengujian ini dilakukan untuk penelitian yang menggunakan kuisisioner, yang bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliabel. Uji kualitas data ini terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas.

4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner. Suatu kuisisioner yang valid dapat dilihat dari nilai signifikansi, apabila nilai signifikansi nya $< 0,05$ berarti pertanyaan dalam kuisisioner tersebut mampu untuk mengungkapkan apa yang akan diukur (Ghozali, 2018). Hasil uji validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Sig (2 Tailed)	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan	Item 1	0.000	Valid
	Item 2	0.000	Valid
	Item 3	0.000	Valid
	Item 4	0.000	Valid
	Item 5	0.000	Valid
	Item 6	0.000	Valid
	Item 7	0.000	Valid
	Item 8	0.000	Valid
	Item 9	0.000	Valid
	Item 10	0.000	Valid
Pelayanan Fiskus	Item 1	0.000	Valid
	Item 2	0.000	Valid
	Item 3	0.000	Valid
	Item 4	0.000	Valid
	Item 5	0.000	Valid
	Item 6	0.000	Valid
	Item 7	0.000	Valid
Sanksi Pajak	Item 1	0.000	Valid
	Item 2	0.000	Valid
	Item 3	0.000	Valid
	Item 4	0.000	Valid
	Item 5	0.000	Valid
	Item 6	0.000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Item 1	0.000	Valid
	Item 2	0.000	Valid
	Item 3	0.000	Valid
	Item 4	0.000	Valid
	Item 5	0.000	Valid
	Item 6	0.000	Valid
	Item 7	0.000	Valid

Sumber: Data primer, diolah 2019

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ yaitu 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan

dinyatakan valid dan dapat dinyatakan layak sebagai instrumen untuk mengukur data penelitian.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah kuisioner penelitian yang akan digunakan untuk mengumpulkan data variabel penelitian reliabel atau tidak. Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu kuisioner dapat dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach Alpha $> 0,70$ (Ghozali,2018). Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Nilai kritis	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan	0.836	0.70	Reliabel
Pelayanan Fiskus	0.856	0.70	Reliabel
Sanksi Pajak	0.721	0.70	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.779	0.70	Reliabel

Sumber: Data primer, diolah 2019

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada Tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien *Cronbach Alpha* pada masing-masing variabel

nilainya > 0,70. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam variabel penelitian reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

4.4 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai data variabel yang diteliti yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai minimum dan maksimum (Ghozali, 2018). Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sosialisasi Perpajakan	102	2	4	2,89	,489
Pelayanan Fiskus	102	1	4	2,98	,596
Sanksi Pajak	102	2	4	3,00	,512
Kepatuhan Wajib Pajak	102	1	4	2,88	,569
Valid N (listwise)	102				

Sumber: Data primer, diolah 2019

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas, maka dapat diketahui deskriptif masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

- a. Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel sosialisasi perpajakan menunjukkan nilai minimum sebesar 2 yang menunjukkan bahwa dari

seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas sosialisasi perpajakan yaitu sebesar 2 atau tidak setuju. Nilai maksimum sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas sosialisasi perpajakan adalah sebesar 4 atau sangat setuju. Nilai rata-rata responden yang memberikan jawaban atas sosialisasi perpajakan adalah sebesar 2,89 dan nilai standar deviasi sebesar 0,489 yang menunjukkan data variabel sosialisasi perpajakan bersifat homogen karena nilai rata-rata yang lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi.

- b. Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel pelayanan fiskus menunjukkan nilai minimum sebesar 1 yang menunjukkan bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas pelayanan fiskus yaitu sebesar 1 atau sangat tidak setuju. Nilai maksimum sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas pelayanan fiskus adalah sebesar 4 atau sangat setuju. Nilai rata-rata responden yang memberikan jawaban atas pelayanan fiskus adalah sebesar 2,98 dan nilai standar deviasi sebesar 0,596 yang menunjukkan data variabel pelayanan fiskus bersifat homogen karena nilai rata-rata yang lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi.
- c. Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel sanksi pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 2 yang menunjukkan bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas sanksi pajak yaitu sebesar 2 atau tidak setuju. Nilai maksimum sebesar 4 yang

berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas sanksi pajak adalah sebesar 4 atau sangat setuju. Nilai rata-rata responden yang memberikan jawaban atas sanksi pajak adalah sebesar 3,00 dan nilai standar deviasi sebesar 0,512 yang menunjukkan data variabel sanksi pajak bersifat homogen karena nilai rata-rata yang lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi.

- d. Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 1 yang menunjukkan bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 1 atau sangat tidak setuju. Nilai maksimum sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 4 atau sangat setuju. Nilai rata-rata responden yang memberikan jawaban atas kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 2,88 dan nilai standar deviasi sebesar 0,569 yang menunjukkan data variabel kepatuhan wajib pajak bersifat homogen karena nilai rata-rata yang lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi.

4.5 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian terdapat masalah asumsi klasik atau tidak yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data variabel penelitian terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas ini dilakukan dengan rumus *kolmogorov smirnov* dengan signifikansi 0,05. Apabila nilai signifikansi nya lebih dari 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Normalitas

Unstandar_Residual	Batas	Keterangan
0,601	0,05	Normal

Sumber: Data primer, diolah 2019

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas dapat diketahui bahwa nilai *asyp.sig* sebesar $0,601 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal karena nilai *asyp. sig* $> 0,05$.

4.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk menguji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan VIF (Varians Inflating Factor) nya, apabila nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas, dan sebaliknya (Ghozali, 2018). Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut:

Tabel 4.11

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan	0.699	1.431	Tidak terjadi multikolinieritas
Pelayanan Fiskus	0.692	1.445	Tidak terjadi multikolinieritas
Sanksi Pajak	0.866	1.155	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data primer, diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari variabel-variabel tersebut di atas 0,10 dan nilai VIF < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terdapat masalah multikolinearitas.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Glejser.

Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka dikatakan homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas, akan tetapi jika memiliki nilai signifikansi < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

Hasil uji Heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	sig	Batas	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan	0.113	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas
Pelayanan Fiskus	0.276	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas
Sanksi Pajak	0.876	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas

Sumber: Data primer, diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.12 di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk seluruh variabel dalam penelitian ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.6 Uji Hipotesis

4.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari variabel sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.13**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Variabel	B	Beta	t hitung	Sig t	Keterangan
(Constant)	1.345		0,601	0,549	
Sosialisasi Perpajakan	0.355	0.436	4.841	0.000	H ₁ didukung
Pelayanan Fiskus	0.199	0.208	2.301	0.024	H ₂ didukung
Sanksi Pajak	0.246	0.189	2.340	0.021	H ₃ didukung
F hitung	26.003				
Sig F	0.000				
R square		0.426			

Sumber: Data primer, diolah 2019

Berdasarkan Tabel 4.13 di atas maka persamaan model regresi mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang diperoleh dapat diuraikan sebagai berikut:

$$Y = 1.345 + 0.355X_1 + 0.199X_2 + 0.246X_3$$

Dari persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 1.345 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak) sebesar 1.345 satuan.
2. Koefisien variabel sosialisasi perpajakan (X₁) sebesar 0,355. Angka tersebut menunjukkan bahwa apabila sosialisasi perpajakan meningkat satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,355. Dengan asumsi

bahwa variabel independen lainnya tidak mengalami perubahan atau konstan.

3. Koefisien variabel pelayanan fiskus (X2) sebesar 0,199. Angka tersebut menunjukkan bahwa apabila pelayanan fiskus meningkat satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,199. Dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tidak mengalami perubahan atau konstan.
4. Koefisien variabel sanksi pajak (X3) sebesar 0,246. Angka tersebut menunjukkan bahwa apabila sanksi pajak meningkat satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,246. Dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tidak mengalami perubahan atau konstan.

4.6.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Hasil analisis koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut:

Tabel 4.14

Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
,666 ^a	,443	,426	3,019

Sumber: Data primer, diolah 2019

Berdasarkan Tabel 4.14 di atas menunjukkan besarnya nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) adalah 0,426. Hal ini menunjukkan bahwa 42,6% perubahan kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh perubahan variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan,

pelayanan fiskus, dan sanksi pajak. Sedangkan sisanya 57,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

4.6.3 Uji t

Uji parsial atau uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan yang dilihat dari nilai signifikansi 0,05 atau 5%. Apabila nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima atau variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis tidak diterima atau variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 4.15 berikut:

Tabel 4.15
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Keterangan
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	1,345	2,239		,601	,549	
Sosialisasi Perpajakan	,355	,073	,436	4,841	,000	H1 di dukung
Pelayanan Fiskus	,199	,087	,208	2,301	,024	H2 di dukung
Sanksi Pajak	,246	,105	,189	2,340	,021	H3 di dukung

Sumber: Data primer, diolah 2019

Berdasarkan Tabel 4.15 di atas, maka dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

a. Pengujian Hipotesis Pertama

Pengujian ini untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil uji t pada Tabel 4.15, menunjukkan nilai koefisien regresi sosialisasi perpajakan sebesar 0,355 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Apabila nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima atau variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan nilai $0,000 \leq 0,05$ artinya variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai koefisien regresi positif sebesar 0,355 dan nilai signifikansi $0,000 \leq 0,05$ sehingga hipotesis pertama diterima.

b. Pengujian Hipotesis Kedua

Pengujian ini untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil uji t pada Tabel 4.15, menunjukkan nilai koefisien regresi pelayanan fiskus sebesar 0,199 dan nilai signifikansi sebesar 0,024. Apabila nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima atau variabel independen

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan nilai $0,024 \leq 0,05$ maka variabel pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai koefisien regresi positif sebesar 0,199 dan nilai signifikansi $0,024 \leq 0,05$ sehingga hipotesis kedua diterima.

c. Pengujian Hipotesis Ketiga

Pengujian ini untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil uji t pada Tabel 4.15, menunjukkan nilai koefisien regresi sanksi pajak sebesar 0,246 dan nilai signifikansi sebesar 0,021. Apabila nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima atau variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan nilai $0,021 \leq 0,05$ maka variabel sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai koefisien regresi positif sebesar 0,246 dan nilai signifikansi $0,021 \leq 0,05$ sehingga hipotesis ketiga diterima.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t untuk variabel sosialisasi perpajakan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien regresi positif 0,355 sehingga hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan teori atribusi yang menyebutkan bahwa dalam memahami penyebab perilaku orang lain, individu akan menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal dimana sosialisasi perpajakan ini merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak. Dengan sosialisasi perpajakan yang rutin diberikan oleh DJP akan menambah informasi dan pemahaman wajib pajak terkait fungsi perpajakan dan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Fungsi perpajakan sendiri terdiri dari fungsi budgetair yang berarti pajak merupakan salah satu sumber keuangan dan penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara serta fungsi regularend yang artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu selain bidang keuangan. Dengan pemahaman yang dimiliki wajib pajak terkait pentingnya fungsi perpajakan tersebut, selanjutnya akan timbul kesadaran dalam diri wajib pajak bahwa pajak yang dibayarkan digunakan

untuk kepentingan negara yang dikembalikan lagi untuk kemakmuran masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rama Putra, Handayani, & Topowijono (2014); Dwi Ananda, Kumadji, & Husaini (2015); dan Widowati (2015) yang juga menyebutkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti wajib pajak sudah cukup mengetahui dan memperoleh informasi melalui sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh KPP setempat karena dengan rutusnya sosialisasi perpajakan yang diberikan akan meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya wajib pajak terkait sistem perpajakan serta manfaat yang didapatkan sehingga wajib pajak menjadi sadar akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini menunjukkan semakin tingginya sosialisasi perpajakan yang diberikan juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang direplikasi yaitu penelitian Lianty, Hapsari, Kurnia (2017) yang memberikan hasil bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat disebabkan adanya perbedaan pada tempat penelitian dimana pada penelitian replikasi penelitian dilakukan di KPP Pratama Bandung Bojonagara, sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta sehingga dengan perbedaan tersebut memungkinkan adanya perbedaan jawaban pada tiap responden. Selain itu, perbedaan pada hasil penelitian ini kemungkinan juga disebabkan karena adanya perbedaan karakteristik pada

wajib pajak seperti masih terdapat responden yang kurang memahami materi atau informasi perpajakan yang disampaikan yang menyebabkan wajib pajak belum menjadi peduli dan sadar akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan sehingga hasil penelitian replikasi menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.2 Pengaruh Pelayanan fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t untuk variabel pelayanan fiskus diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,199 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien regresi positif 0,199 sehingga hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini sesuai dengan teori atribusi yang menyebutkan bahwa dalam memahami penyebab perilaku orang lain, individu akan menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal dimana pelayanan fiskus ini merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak. Pelayanan yang diberikan ini seperti sikap petugas pajak dalam melayani wajib pajak, kenyamanan kantor pajak maupun kemudahan sistem yang ada. Ketika pelayanan yang diberikan cukup baik, wajib pajak akan merasa nyaman dalam menjalankan proses perpajakan. Dengan kemudahan yang ada wajib pajak cenderung akan terus melaksanakan proses perpajakan karena tidak lagi merasa kesulitan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan oleh fiskus maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian replikasi yaitu penelitian Lianty, Hapsari, Kurnia (2017). Pada penelitian ini juga menyebutkan pelayanan yang baik yang diberikan seperti petugas pajak (fiskus) yang menjaga sopan dan santun dalam berperilaku, tanggap dan tidak mempersulit pelayanan dalam melayani wajib pajak secara langsung, sehingga wajib pajak merasa nyaman dalam melakukan proses perpajakannya. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Mutia (2014) dan Ramdhani, R.F (2018) yang menyebutkan bahwa pelayanan fiskus juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak sudah mendapatkan pelayanan yang cukup baik dan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak, sehingga semakin baiknya pelayanan fiskus juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4.7.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t untuk variabel sanksi pajak diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,021 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien regresi positif 0,246 sehingga hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam Theory of Planned Behavior atau TPB disebutkan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku, dimana niat tersebut salah satunya dapat disebabkan oleh faktor control belief yang merupakan keyakinan tentang adanya hal-hal yang mendukung maupun menghambat seseorang dalam berperilaku dan persepsi

seberapa kuat hal-hal tersebut dapat mendukung dan menghambat perilaku tersebut. Sanksi pajak ini berkaitan dengan faktor control belief, dimana keberadaan sanksi pajak ini dapat mendukung wajib pajak dalam berperilaku taat pajak karena merasa takut dengan sanksi yang dikenakan sehingga memilih untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dibandingkan dikenakan sanksi yang dapat merugikan dirinya sendiri.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Murtedjo (2011); Mutia (2014); Rama Putra, Handayani, & Topowijono (2014); Suhendry (2015); Widowati (2015), dan Brata Yuningsih, & Kesuma (2017) yang menyebutkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelaksanaan sanksi yang tegas pada setiap pelanggaran yang dilakukan wajib pajak dapat merugikan diri wajib pajak sendiri, sehingga kemungkinan wajib pajak lebih memilih untuk patuh agar tidak dikenakan sanksi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin tinggi.

Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian Bahri, S., Diantimala, Y., dan Abd. Majid, M. S. (2018) yang menyebutkan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini kemungkinan disebabkan adanya perbedaan pada objek penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Banda Aceh, sedangkan penelitian ini wajib pajak orang pribadi dengan kriteria tertentu yaitu yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Yogyakarta, sehingga perbedaan hasil ini kemungkinan juga dapat disebabkan karena masih terdapat wajib pajak yang

menganggap remeh adanya sanksi pajak karena kurangnya informasi terkait sanksi-sanksi yang berlaku atau tidak adanya tindakan yang nyata atas penerapan sanksi tersebut yang membuat sanksi pajak belum efektif untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

